



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI**

SALINAN

RESUME RAPAT PEMBAHASAN RAPERDA PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Hari/Tanggal : Kamis, 1 Agustus 2024
Waktu/Pukul : 13.00 s/d 16.00 WIB
Materi : Rapat Kerja Pembahasan Raperda Pembinaan Ideologi Pancasila bersama eksekutif
Tempat : Ruang Rapat Khusus DPRD Kabupaten Banyuwangi
Peserta Rapat : 1. Ketua dan Anggota Pansus Raperda Pembinaan Ideologi Pancasila
2. Staff Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi
3. Tim Ahli/Pakar Pansus Raperda Pembinaan Ideologi Pancasila
4. Perwakilan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia

Hasil:

1. Ketua Pansus Raperda Pembinaan Ideologi Pancasila DPRD Kabupaten Banyuwangi membuka rapat dengan memperkenalkan satu per satu peserta rapat;
2. Ketua Pansus Raperda Pembinaan Ideologi Pancasila DPRD Kabupaten Banyuwangi menyampaikan maksud dan tujuan rapat gabungan antara legislatif, eksekutif, dan perwakilan BPIP RI terkait pembentukan Perda Pembinaan Ideologi Pancasila;
3. Perwakilan BPIP dari unsur Perancang Peraturan perundang-undangan, memberikan sambutan dan ucapan terima kasih karena turut dilibatkan dalam pembentukan Perda Kabupaten Banyuwangi tentang Pembinaan Ideologi Pancasila;
4. Tim ahli/Pakar menyampaikan bahwa inisiatif pembentukan Perda Pembinaan Ideologi Pancasila agar ideologi bangsa tetap terjaga dalam mewujudkan Pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya, serta mewujudkan masyarakat yang berideologi, rukun, dan toleran di tengah kemajemukan masyarakat berdasarkan keraagaman suku, ras, agama, golongan, sosial, ekonomi, budaya, dan kearifan lokal;
5. Perwakilan BPIP dari unsur Perancang Peraturan perundang-undangan, memberi apresiasi kepada DPRD Kabupaten Banyuwangi yang telah menunjukkan komitmennya dalam mempertahankan ideologi Pancasila;
6. Ketua Pansus Raperda Pembinaan Ideologi Pancasila DPRD Kabupaten Banyuwangi berharap ada arahan terkait materi Raperda PIP yang telah disusun agar secara normative saja, namun bisa menuangkan hal-hal teknis, misalnya: terkait keinginan memanifestasikan Pancasila melalui kewajiban membunyikan atau menyanyikan lagu Indonesia Raya di instansi pemerintah, lembaga Pendidikan, pasar, dan tempat strategis lainnya?

7. Bagian Hukum Pemkab. Banyuwangi menerangkan jika tidak masalah jika ada muatan lokal yang diinginkan masuk dalam Raperda Pembinaan Ideologi Pancasila selama tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang ada dan berlaku. Selain daripada itu, hal-hal yang bersifat lebih teknis dapat diperkuat melalui Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Bupati/Perbub);
8. Wakil Ketua Pansus Raperda Pembinaan Ideologi Pancasila DPRD Kabupaten Banyuwangi, mempertanyakan cara efektif memahami atau melestarikan Pancasila baik kepada pemerintah, masyarakat, maupun pihak swasta? Hal tersebut agar bisa termaktub dalam Raperda Pembinaan Ideologi Pancasila;
9. Perwakilan BPIP dari unsur Analisis Kebijakan, menjelaskan bahwa perkembangan era modern membuat berbagai pola sosialisasi konvensional dalam penguatan atau pelaksanaan Pancasila dalam masyarakat, baik dalam bentuk ceramah, seminar, dan sebagainya kurang mengena di hati masyarakat, khususnya bagi kelompok pelajar dan mahasiswa. Oleh karenanya perlu modernisasi cara, seperti melalui video, kegiatan kepemudaan, bunyi-bunyian melalui pengeras di tempat strategis, dan digitalisasi lainnya. Selain daripada itu dengan memberikan penghargaan bagi instansi maupun lembaga masyarakat dan swasta yang berkontribusi menjaga Pancasila melalui program kegiatan;
10. Anggota Pansus Raperda Pembinaan Ideologi Pancasila dari Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kabupaten Banyuwangi, menanyakan apakah supporting anggaran dalam implementasi Perda Pembinaan Ideologi Pancasila (nantinya) hanya terfokus pada APBD Kabupaten Banyuwangi?
11. Perwakilan BPIP dari Auditor, menjelaskan selain melalui APBD Kabupaten Banyuwangi, bahwa BPIP telah melakukan upaya back up anggaran kegiatan Kepancasilan yang ada di daerah melalui penganggaran di Kemendagri;
12. Anggota Pansus Raperda Pembinaan Ideologi Pancasila dari Fraksi Kebangkitan Bangsa berharap agar eksekutif turut aktif dalam pembahasan Raperda Pembinaan Ideologi Pancasila, karena setelah ada penetapan, pihak eksekutif bertindak sebagai implementor utama;
13. Kepala Kesbangpol Banyuwangi menyampaikan jika eksekutif sangat mendukung setiap tahapan pembentukan Raperda Pembinaan Ideologi Pancasila karena bermanfaat menyadarkan semua pihak untuk mengamalkan Ideologi Pancasila di setiap Tindakan, sehingga secara langsung maupun tidak langsung meluruskan organisasi-organisasi yang bertentangan dengan konstitusi dan ideologi Pancasila untuk tunduk dan patuh terhadap konstitusi dan ideologi Pancasila;
14. Anggota Pansus Raperda Pembinaan Ideologi Pancasila dari Fraksi Golongan Karya memiliki keinginan agar nantinya Perda Pembinaan Ideologi Pancasila bisa di implementasi secara serius dan terus-menerus. Hal tersebut dirasa penting karena keberadaan Perda Pembinaan Ideologi Pancasila sangat cocok untuk membentuk karakter yang berbasis pada ideologi bangsa dan negara;

15. Tim ahli/Pakar berpendapat jika Perda Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai modal Pemerintah Kabupaten Banyuwangi serta segenap masyarakat Banyuwangi berjiwa Pancasila. Oleh karenanya Perda tersebut tidak boleh ditempatkan sekedar proyek pemerintah saja, tetapi harus dilaksanakan dengan cepat, tepat, dan menyeluruh;
16. Ketua Pansus Raperda Pembinaan Ideologi Pancasila DPRD Kabupaten Banyuwangi menutup rapat gabungan terkait Raperda Pembinaan Ideologi Pancasila.

Banyuwangi, 1 Agustus 2024
DPRD Kabupaten Banyuwangi
Ketua Pansus PIP,

Ttd.

PATEMO